

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI I DPR RI  
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN  
NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA  
KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS,  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

---

Tahun Sidang : 2012-2013  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Senin, 4 Maret 2013  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Pimpinan Rapat : Drs. Ramadhan Pohan, MIS.  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : Penjelasan Ketua KI Pusat mengenai:  
1. Evaluasi Kinerja KI Pusat Tahun 2012  
2. Realisasi Anggaran KI Pusat T.A. 2012 (Semester I dan II)  
3. Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI terhadap Laporan Realisasi Keuangan KI Pusat T.A. 2011 dan T.A. 2012  
4. Rencana Program Kerja KI Pusat Tahun 2013  
Hadir : 1. 32 orang dari 46 orang Anggota Komisi I DPR RI  
2. KI Pusat:  
a. Abdul Rahman Ma'mun, Ketua  
b. Heny S. Widyaningsih, Wakil Ketua  
c. Dono Prasetyo, Anggota  
d. Ramly Amin Simbolon, Anggota  
e. Amirudin, Anggota  
beserta jajaran

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan KI Pusat pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2013 dengan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Ramadhan Pohan, MIS., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI mendesak Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) untuk terus melaksanakan fungsinya sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
2. Komisi I DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan RI agar KI Pusat memiliki nomenklatur anggaran tersendiri guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) KI Pusat.
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja KI Pusat, Komisi I DPR RI mendesak KI Pusat untuk terus meningkatkan sosialisasi UU tentang KIP, kelembagaan KI Pusat dan KI Provinsi, pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat Lembaga Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota, serta mendorong KI Pusat untuk terus melakukan MoU dengan Lembaga Negara lain dalam rangka pelaksanaan UU tentang KIP.
4. Komisi I DPR RI mendukung program kerja KI Pusat Tahun 2013 serta langkah-langkah prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi kinerja KI Pusat dan KI Provinsi.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 4 Maret 2013  
**KETUA RAPAT,**

**Drs. RAMADHAN POHAN, MIS.**  
**A-520**